

KAJIAN TATA CARA PENCAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA RPJMN 2010 - 2014

Dicky R Munaf*

Email : dicky_munaf@yahoo.com

ABSTRAK

Setiap instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja tidak lepas dari renstra instansi tersebut yang bermuara pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010 – 2014. Indikator kinerja sangat penting agar arah kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Indikator kinerja dari setiap instansi pemerintah berbeda satu sama lain bergantung pada kebutuhan dan peran instansi tersebut. Bakorkamla sebagai lembaga pemerintah menganalisis indikator kerjanya yang diharapkan dapat mencapai sasaran sesuai dengan RPJMN 2010-2014 dan prinsip *good governace*.

Kata Kunci : kinerja, indikator, renstra

ABSTRACT

In carrying out the performance, every government agency can not be separated from that agency strategic plan that led to the RPJMN (National Medium Term Development Plan) from 2010 to 2014. Performance indicators is essential for performance in accordance with the directions that are expected. Indicators of the performance of any Government agency different from each other depending on the need and role of agencies, as Bakorkamla Maritime Security Coordinating Board to analyze the performance indicators that are expected to reach the target in accordance with RPJMN 2010-2014 and the principles of good governace.

Keywords: *Performance, Indicators, Strategic Plan*

* Dosen Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, FSRD,
Institut Teknologi Bandung

PENDAHULUAN

Segala bentuk kegiatan pelayanan atau kinerja yang dilaksanakan setiap instansi Pemerintah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, Kinerja yang dihasilkan maksimal harus sesuai dengan prinsip *good governace* (pemerintahan yang baik). Karena kinerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap instansi pemerintah, kinerja dapat dijadikan acuan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi. Dengan demikian, instansi pemerintah tersebut mampu bersaing dan berkembang maksimal berhasil dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Kinerja merupakan hubungan fungsional yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), dan motivasi. Persamaan ketiga faktor tersebut dinotasikan sebagai berikut.

Kinerja	= f (<i>knowledge</i> , <i>skill</i> dan motivasi)
Kinerja	: Sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan;
Knowledge	: Mengacu pada pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai (<i>knowing what to do</i>),
skill	: Mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan (<i>the ability to do well</i>),
motivasi	: Dorongan dan semangat untuk bekerja.

Kinerja yang telah dicapai suatu instansi pemerintah harus dievaluasi, atau diukur, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja harus sesuai dengan yang ditetapkan atau desain dalam perencanaan atau lebih dikenal dengan renstra K/L (renstra Kementerian/Lembaga) yang bermuara pada RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahkan RPJP (rencana pembangunan jangka panjang).

Untuk mengukur kinerja digunakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang umum sering dipakai, yaitu sebagai berikut.

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, setiap instansi pemerintah mempunyai indikator kinerja yang berbeda satu sama lain bergantung pada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh setiap instansi.

ANALISIS INDIKATOR KINERJA BAKORKAMLA TERKAIT RPJMN 2010-2014

Untuk mendapatkan indikator kinerja antara lain :

1. Koridor tolok ukur yang menjadi norma dasar.
Langkah pertama yang perlu dikaji adalah menentukan koridor tolok ukur. Tolok ukur menurut *kamus bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur atau menilai; patokan; standar. Jadi, pada

intinya kita harus menganalisis apa saja yang menjadi standar (tolok ukur) atau norma apa saja yang perlu digunakan untuk menyusun tolok ukur ini agar mendapatkan indikator yang terdiri dari parameter yang berke-relasi dengan RPJMN 2010-14 ke depan yang lebih komprehensif dan terpadu.

Koridor tolok ukur ini di antaranya adalah

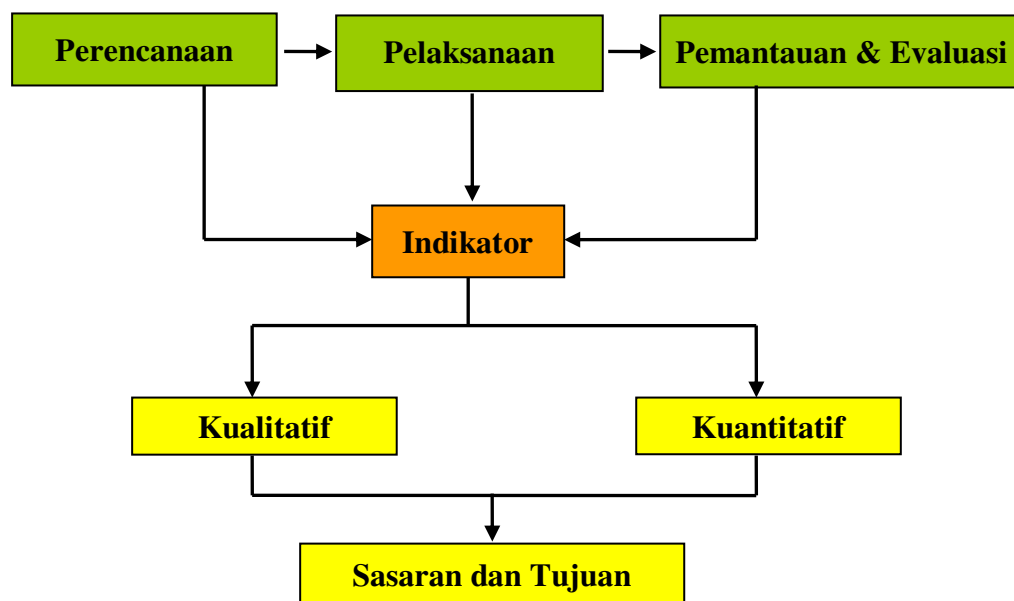
1. permasalahan keamanan laut NKRI,
2. Renstra Bakorkamla 2010-2014,
3. Jakstra Bakorkamla,
4. Visi-Misi NKRI,
5. Visi-Misi Bakorkamla, dan
6. RPJMN 2010-2014.

2. Penentuan Indikator

Setelah menganalisis norma apa saja yang akan dijadikan tolok ukur, langkah selanjutnya adalah menganalisis indikator yang bermuara pada tolok ukur tersebut. Adapun indikator adalah variabel untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981). Selain itu, indikator adalah variabel yang mengindikasikan/memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).

Untuk mendapatkan indikator kinerja adalah berikut ini.

Kedudukan Indikator Kinerja



Sumber : Bappenas

Gambar 1 Kedudukan indikator kinerja

Analisis untuk mendapatkan indikator :

Perencanaan	Sesuai dengan Visi, Misi, Fungsi, Norma, Renstra, Jakstra, dll.
Pelaksanaan	Kinerja Bakorkamla terkait dengan RPJM Bakorkamla dan RPJMN 2010-2014.
Pemantauan & Evaluasi	Sejauh mana kinerja Bakorkamla terkait dengan RPJM Bakorkamla dan RPJMN 2010-2014 sudah terpenuhi atau belum untuk menuju tujuan dan sasaran yang sama
Indikator	Adalah variabel untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981). Selain itu indikator juga adalah variabel yang meng-indikasikan/memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
Kualitatif	Mutu
Kuantitatif	Jumlah
Sasaran	Sesuatu yang menjadi tujuan
Tujuan	Arah haluan yang dituju

3. Penentuan Parameter

Parameter menurut *kamus bahasa Indonesia* adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat dalam percontohan. Parameter ini akan dikaji, dengan indikator terlebih dahulu, lalu dari indikator tersebut dikembangkan menjadi parameter atau hal-hal apa saja yang menjadi detail-detail atau ukuran yang terdapat dalam indikator. Dengan didapatnya parameter yang dianalisis berdasarkan indikator terkait, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan parameter tersebut.

4. Evaluasi

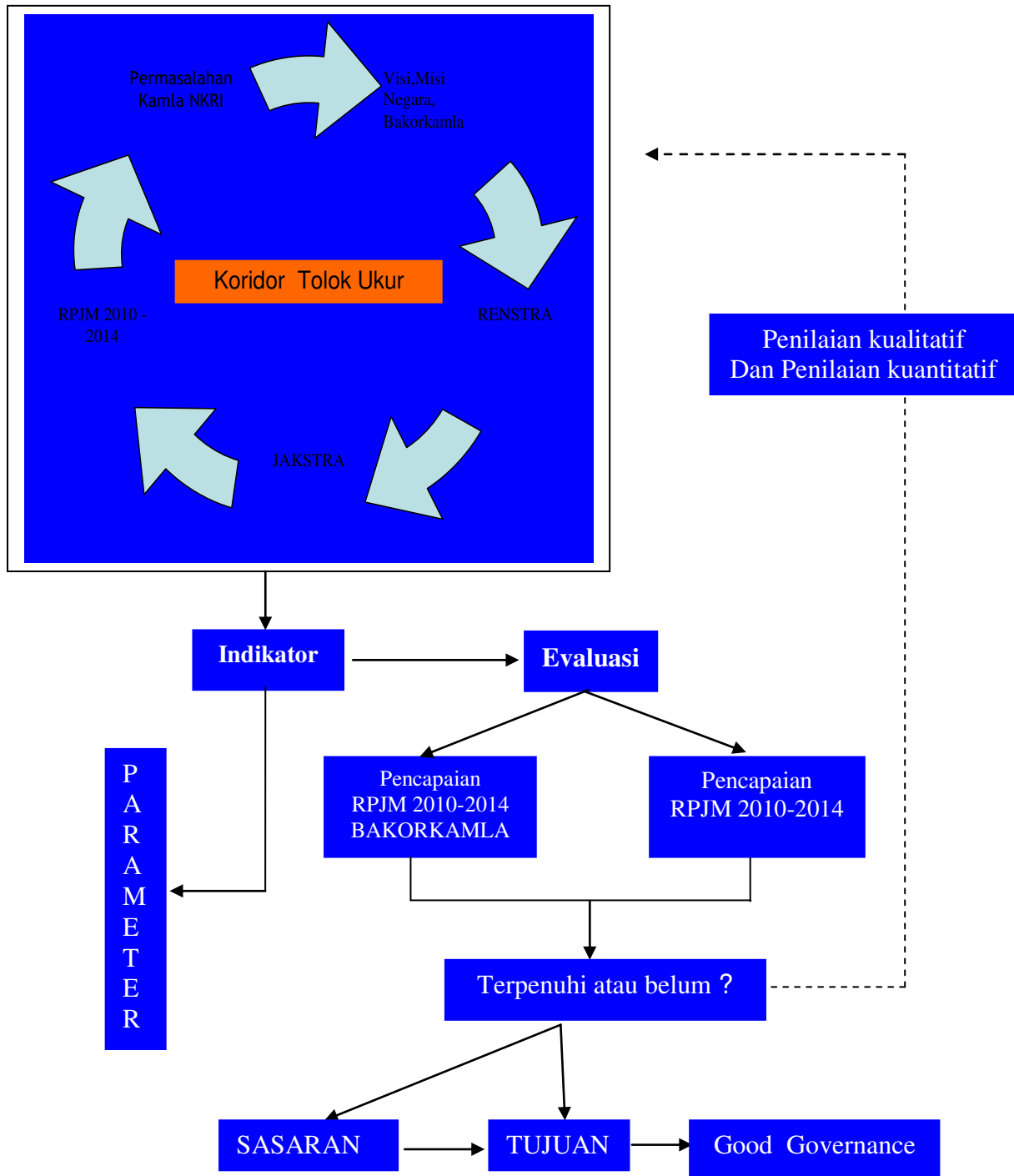
Melakukan evaluasi berdasarkan indikator yang terdiri atas parameter yang dihasilkan yang bermuara pada tolok ukur yang dikaji. Hasil evaluasi dikorelasikan dengan RPJMN dan RPJM Bakorkamla berdasarkan kinerja Bakorkamla. Sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh Bakorkamla terkait dengan RPJM Bakorkamla dan RPJMN 2010-2014, sudah terpenuhi atau belum kinerja yang dihasilkan, setidaknya

harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good governace* (pemerintahan yang baik). Selanjutnya, dilakukan penilaian kualitatif dan penilian kuantitatif dari hasil evaluasi yang didapat. Dari penilaian tersebut dapat diketahui apakah instansi pemerintah, dalam hal ini, Bakorkamla sudah cukup atau masih banyak kekurangan dalam melaksanakan kerjanya.

5. Sasaran dan Tujuan

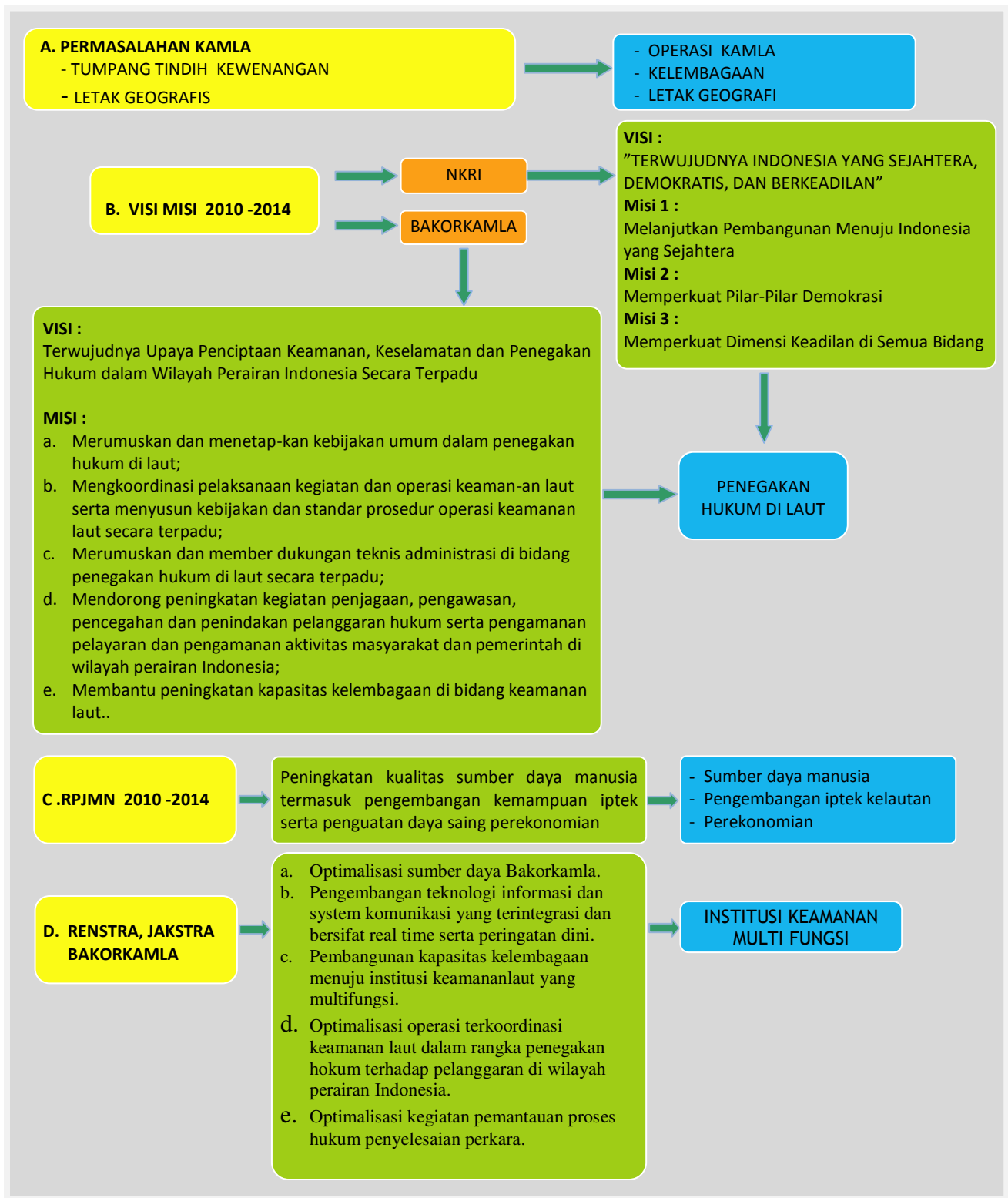
Dari hasil evaluasi tersebut di atas, dapat dilihat sudah sejauh mana pencapaian indikator renstra Bakorkamla terhadap RPJMN 2010-2014. Jika sudah terpenuhi berapa persentase yang terpenuhinya, jika belum terpenuhi berapa persentase yang belum terpenuhinya. Dari hasil tersebut, dapat ditentukan sasaran dan tujuan. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan dan tujuan adalah arah haluan yang dituju.

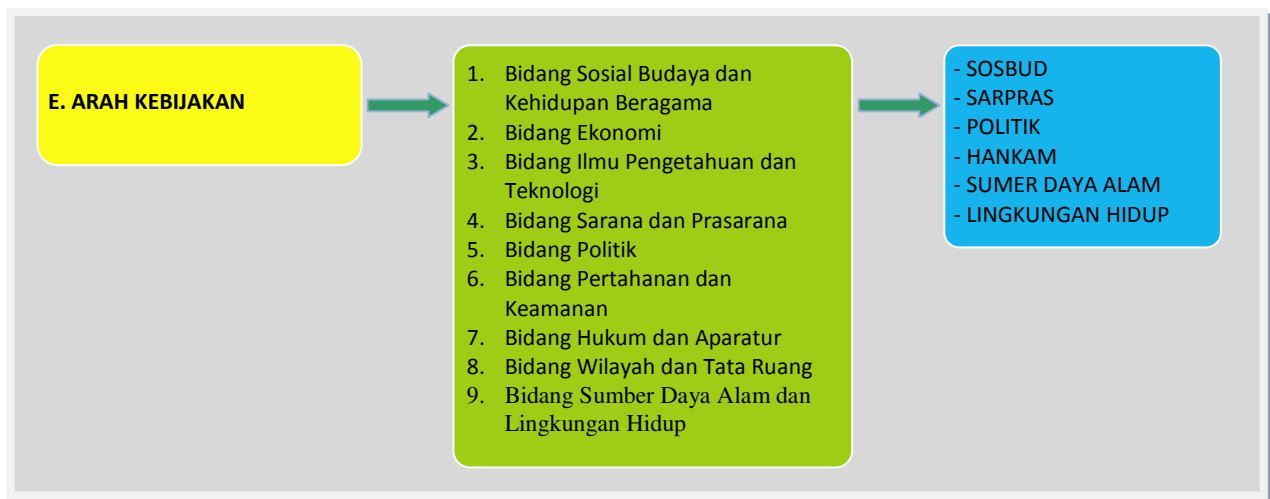
Untuk lebih jelasnya penjabaran apa dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 2 Penentuan indikator kinerja Bakorkamla terkait RPJMN 2010-2014.

Uraian keterkaitan koridor tolok ukur dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 3 Uraian keterkaitan koridor tolok ukur.

Berdasarkan gambar tersebut, indikator Bakorkamla setelah dianalisis hasilnya adalah disertai parameter untuk menunjang kinerja berikut ini.

TABEL 1 INDIKATOR DAN PARAMETER UNTUK MENUNJANG KINERJA BAKORKAMLA TERHADAP RPJMN 2010-2014

No	Indikator	Parameter
1	Operasi Keamanan laut	1. Pengamanan, pengawasan dan penertiban jalur pantai dan laut (terutama ALKI). 2. Penegakan Hukum di Laut yang terintegrasi. 3. Pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut. 4. Kegiatan gladi posko dan operasi intelijen. 5. Pemantauan proses hukum penyelesaian perkara.
2.	Kelembagaan	1. Kebijakan mengenai badan pengaman laut yang multi fungsi. 2. Kebijakan publik terkait keamanan dan keselamatan di laut. 3. Kebijakan teknis terkait keamanan laut. 4. kegiatan penyusunan kebijakan kelautan. 5. kegiatan penyusunan jaringan sistem informasi. 6. Kegiatan peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas
3	A. Kerjasama dengan luar negeri (terutama yang sering melewati perairan Indonesia)	1. Bidang Keamanan Pertahanan Laut : - <i>Illegal logging</i> - <i>Illegal fishing</i> , dll. 2. Bidang Alutsista. 3. Bidang Pembuangan Sampah, limbah, dll. 4. Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama internasional.
	B. Kerjasama dalam negeri (pemerintah maupun swasta pengguna perairan Indonesia)	1. Bidang Keamanan Pertahanan Laut : - <i>Illegal Logging</i> - <i>Illegal fishing</i> , dll. 2. Bidang Alutsista. 3. Bidang Pembuangan Sampah. 4. kegiatan pengembangan jaringan kerjasama regional 5. Kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga
4.	Penegakan Hukum di	Hukum nasional maupun hukum internasional.

No	Indikator	Parameter
	laut	
5.	InstitusiKeamanan multi fungsi	1. Seluruh instansi pengaman laut. 2. Sistem koordinatif.
6.	Pembangunan Kelautan	1. Pemanfaatan sumber daya kelautan. 2. Pelestarian sumber daya kelautan.
7.	Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan-pelatihan. 2. Pendirian Sekolah-sekolah/akademi. 3. Penelitian-penelitian.
8.	Pengembangan Iptek Kelautan	1. Iptek untuk pertahanan dan keamanan kelautan. 2. Penguasaan dan pengembangan iptek. 3. Alutsista.
9.	Perekonomian	Pangsa Pasar Nasional : 1. Pembangunan Ekonomi Kelautan. 2. Industri Kelautan. 3. Perhubungan Laut (Pelabuhan). 4. Perikanan. 5. Wisata Bahari. 6. Sumber daya mineral, energi lepas pantai.
		Pangsa Pasar Internasional : 1. Perikanan. 2. Hasil Pertambangan dan gas bumi lepas pantai. 3. Budidaya perikanan. 4. Rumput laut. 5. Kerajinan Laut.
10.	Sosial Budaya	1. Kerukunan. 2. Persatuan bangsa. 3. Pendidikan nasional. 4. Kesadaran hukum. 5. Generasi muda dan peranannya.
11.	Sarana Prasarana	1. Sarana dan Prasarana : Software(IT) dan Hardware 2. Sarana dan Prasarana Di Pusat 3. Sarana dan Prasarana Di Daerah 4. Kegiatan pembangunan gedung kantor, perlengkapan sarana gedung dan alat pengolah data (di daerah). 5. Kegiatan pengembangan sarana prasarana pengamanan.
12.	Politik	1. Sistem manajemen nasional. 2. Sistem politik. 3. Pembagian wilayah. 4. Otonomi daerah.
13.	Hankam	1.Sistem pertahanan negara. 2. Keamanan lingkungan. 3. Industri & prasarana pendukung pertahanan. 4. Strategi pengembangan wilayah kelautan.
14.	Lingkungan Hidup	1. Pelestarian lingkungan laut nasional dan global. 2. Pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut.
15	Anggaran	1. Pusat. 2. Daerah.

Indikator dan parameter kinerja tersebut dievaluasi sudah sejauh mana kinerja yang sudah dilaksanakan Bakorkamla apa sudah

terpenuhi atau belum, kinerja Bakorkamla tersebut terhadap RPJMN 2010 – 2014. Adapun kondisi penilaian adalah berikut ini.

TABEL 2 KONDISI PENILAIAN KINERJA

KONDISI PENILAIAN	NILAI
	KUALITATIF
Sangat Terpenuhi	85 - 100
Terpenuhi	70 - 84
Cukup Terpenuhi	55 - 69
Kurang Terpenuhi	40 -54
Tidak terpenuhi	< 40

ALISIS KINERJA INSTANSI BAKORKAMLA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Bakorkamla berusaha keras untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan yang diharapkan dalam RPJMN 2010 – 2014, seperti

1. Operasi keamanan laut;
2. Kelembagaan;
3. (a) Kerja sama dengan luar negeri (terutama yang sering melewati perairan Indonesia), (b) Kerja sama dalam negeri (pemerintah maupun swasta pengguna perairan Indonesia);
4. Penegakan hukum di laut;
5. Institusi keamanan multi-fungsi;
6. Pembangunan kelautan;
7. Sumber daya manusia;
8. Pengembangan iptek kelautan;
9. Perekonomian;
10. Sosial Budaya;
11. Sarana Prasarana;
12. Politik;
13. Hankam;
14. Lingkungan Hidup; dan
15. Anggaran.

Jika seluruhnya dijalankan dengan baik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Contoh.

Indikator.

1. Operasi Keamanan laut
2. Parameter :

1. Pengamanan, pengawasan dan penertiban jalur pantai dan laut (terutama ALKI).
2. Penegakan Hukum di Laut yang terintegrasi.
3. Pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
4. Kegiatan gladi posko dan operasi intelijen.
5. Pemantauan proses hukum penyelesaian perkara.

Parameter 1. Pengamanan, pengawasan, dan penertiban jalur pantai dan laut (terutama ALKI).

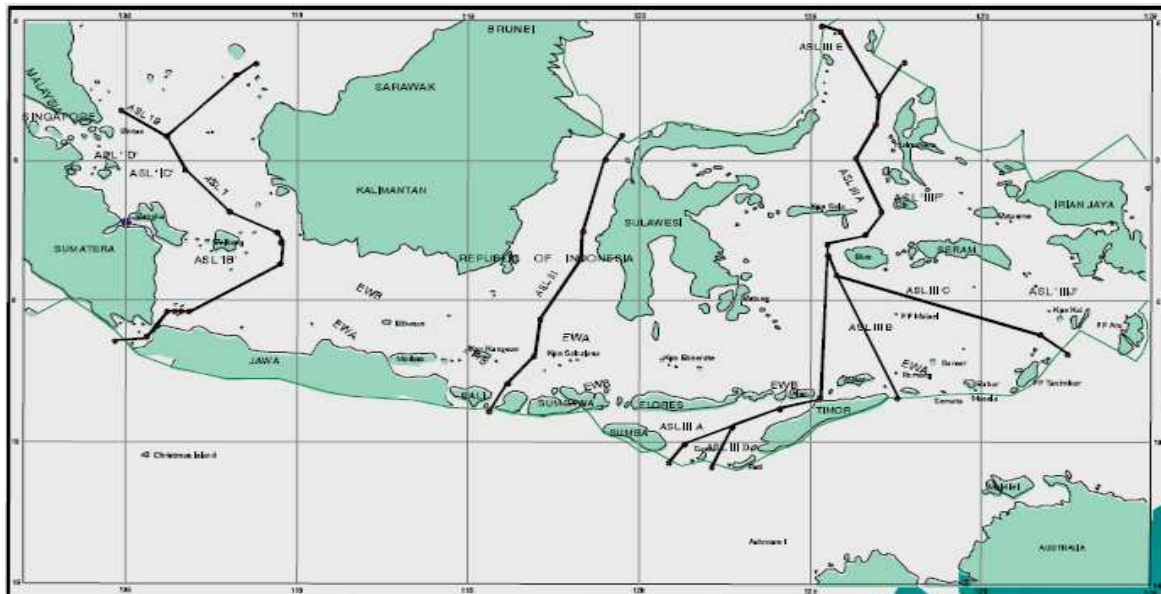
Perairan Indonesia memiliki empat buah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Perairan Indonesia ini menjadi jalur transportasi laut internasional. Dalam satu tahunnya, tidak kurang 51.000 kapal asing dan lokal yang melintas di kawasan ini. Walaupun ada 14 instansi dalam pengamanan laut, wilayah operasi pengamanan laut tidak sepenuhnya tercakup oleh instansi terkait. Hanya TNI AL yang cakupan wilayah operasinya sampai dengan landasan kontinen seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3 WILAYAH OPERASI INSTANSI TERKAIT MILIK SATGAS PATROLI LAUT

Instansi	Wilayah Operasi					
	Perairan Peda laman	Perairan Kepu lauan	Laut Teri torial	ZEEI	Zona Tam bahan	Landas Kon tinen
TNI-AL	•	•	•	•	•	•
POLAIR	•	•	•			
PSDKP	•	•	•	•		
KPLP	•	•	•			
Imigrasi	•	•	•			
Bea Cukai	•	•	•			
BASARNAS	•	•	•			
BAKORKAMLA	•	•	•			

Dengan kondisi tersebut, pengamanan, pengawasan, dan penertiban jalur pantai dan laut (terutama ALKI) perlu ditingkatkan

untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena di ALKI ini merupakan kawasan rawan kejahatan.



Gambar 4 Alur Laut Kepulauan Indonesia

Untuk mencegah hal tersebut, Bakorkamla, memaksimalkan pengawasan dan pengamanan laut. Bakorkamla mendirikan stasiun komunikasi di beberapa daerah yang dianggap sangat berpengaruh untuk menjaga keamanan laut mengingat dalam pengamanan, pengawasan, dan penertiban jalur pantai dan laut (terutama ALKI) sangat penting sehingga dalam kinerjanya

Bakorkamla mendirikan pos pemantau untuk memonitor pengawasan wilayah laut selama 24 jam nonstop yang terdiri atas 10 RCC (Regional Coordinating Center) dan 3 MRCC (Maritime Coordinating Center). Penetapan lokasi MRCC dan RCC tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 4 PENETAPAN LOKASI MARITIME CONTROL CENTER (MRCC) DAN REGIONAL CONTROL CENTER (RCC) BAKORKAMLA

Maritime Control Center (MRCC)			
No	ALKI	URAIAN	LOKASI
1	ALKI I	Maritime ControlCenter (MRCC) Batam	Propinsi. Kepulauan Riau
2	ALKI II	Maritime ControlCenter (MRCC) Bitung	Propinsi. Sulawesi Utara
3	ALKI III	Maritime ControlCenter (MRCC) Ambon	Propinsi. Maluku
RCC			
1	ALKI I	RegionalControlCenter(RCC) Banda Aceh	Propinsi. Nangro Aceh Darusalam
2	ALKI I	RegionalControlCenter(RCC)Tanjung Balai Karimun	Propinsi. Kepulauan Riau
3	ALKI II	RegionalControlCenter(RCC) Bali	Propinsi. Bali
4	ALKI III	RegionalControlCenter(RCC) Kupang	Propinsi. NTT
5	ALKI II	RegionalControlCenter(RCC) Tarakan	Propinsi. Kaltim
6	ALKI III	RegionalControlCenter(RCC) Jayapura	Propinsi. Papua
7	ALKI III	RegionalControlCenter(RCC) Tual	Propinsi. Maluku
8	ALKI III	RegionalControlCenter(RCC) Merauke	Propinsi. Papua
9	ALKI I	RegionalControlCenter(RCC) Natuna	Propinsi. Kepri
10	ALKI II	RegionalControlCenter(RCC) Kema Minahasa Utara	Propinsi. Sulawesi Utara



Gambar 5 Lokasi RCC dan MRCC Bakorkamla.

Selain RCC dan MRCC Bakorkamla pun mempunyai *ground station* yang dapat menunjang pengamanan, pengawasan, dan penertiban jalur pantai dan laut (terutama

ALKI), Perangkat *ground station* merupakan alat yang mempunyai kemampuan melihat kondisi di perairan laut.

TABEL 5 LOKASI GROUND STATION BAKORKAMLA

Ground Station			
No	ALKI	URAIAN	LOKASI
1	ALKI I	Ground Station Bangka Belitung	Propinsi. Bangka Belitung
2	ALKI II	Ground Station Bitung	Propinsi. Sulawesi Utara

Dengan adanya pengawasan, dan pemantauan yang maksimal diharapkan kerugian negara bisa ditekan. Pencurian ikan, pembuangan limbah dan lain-lain dapat diatasi dan hasilnya untuk masyarakat. Sumber kekayaan laut tidak diambil oleh pihak lain dan lingkungan keamanan laut menjadi kondusif.

Parameter 2. Penegakan hukum di laut yang terintegrasi.

Penegakan hukum di laut yang terintegrasi sampai saat ini belum maksimal. Kewenangan penegakan hukum di laut masih oleh berbagai instansi pemerintah yang terkait sehingga masih tumpang tindih kewenangan dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Berikut tabel kewenangan penegakan hukum di laut.

TABEL 6 KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

Kegiatan	Jenis Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan di Laut	Landasan Hukum	Instansi Terkait
Pengawasan	Di Wilayah ZEE	UU No. 5/1985	TNI AL
	Bidang Konservasi SDA	UU No. 5/1990	Dep. Kehutanan,DKP
	Bidang Keimigrasian	UU No. 9/1992	Dep. Hukum dan HAM
	Bidang Pelayaran	UU No. 17/2008	Dep. Perhubungan
	Bidang Kesehatan	UU No. 23/1992	Dep. Kesehatan
	Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	UU No. 16/1992	Dep. Pertanian, DKP
	Bidang Pangan	UU No. 7/1996	Dep Pertanian, DKP
	Bidang Peredaran Psikotropika	UU No. 5/1997	Dep. Kesehatan
	Bidang Lingkungan Hidup	UU No. 23/2001	Dep. Pertanian, DKP, Kementerian LH
	Bidang Kehutanan	UU No. 41/1999	Dep ESDM
	Bidang Minyak dan Gas Bumi	UU No. 22/2001	TNI AL, Dep Pertanian, DKP
	Bidang Perikanan	UU No. 31/2004	TNI AL, DKP
Penindakan	Semua bidang di atas	Semua landasan hukum di atas	TNI AL, Polri, dan Kejaksaan
Koordinasi	Semua bidang di atas	Perpres No. 81/2005	Bakorkamla
Pertahanan		UU NO. 3/2002	TNI-AL

Diharapkan bila hukum sudah terintegrasi dengan baik, tentu akan tercipta sistem pemerintahan yang lebih baik.

Parameter 3. Pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Bakorkamla bersama instansi lainnya ber-usaha melakukan berbagai macam kegiatan pencarian dan pertolongan di laut agar dapat menekan jumlah korban kecelakaan di laut. Berikut kinerja Bakorkamla terkait kegiatan dan pertolongan jiwa di laut :

TABEL 7 PELAKSANAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA DI LAUT

No	Tahun	Keterangan	Pelaksanaan	Cakupan
1	2010	Pencarian	korban tenggelam tiga wisatawan asal Kabupaten Sleman, DIY, dan Temanggung Jawa Tengah di Pantai Parangtritis	Tim SAR Bakorkamla
2	2010	Pertolongan	mengirim bantuan sosial dan kesehatan dan 40 relawan untuk korban bencana alam di Kepulauan Mentawai.	Bakorkamla dan TNI-AL
3	2011	Penyelamatan	penyelamatan dan evakuasi korban tenggelam di lepas pantai kabupaten Bangka Tengah.	Tim SAR MRCC Bakorkamla Bangka Belitung + stake holder lain
4	2011	Pencarian	pencarian korban tenggelam di-perairan Pulau Semujur	Tim SAR MRCC Babel Bakorkamla + stake holder lain
5	2011	Pencarian	pada musibah terbaliknya kapal Sri Murah Rejeki di perairan sebelah barat pulau Jungut Batu, Nusa Penida.	SAR RCC Karangasem Bali

Parameter 4. Kegiatan gladi posko dan operasi intelijen.

Sebagai Badan Koordinasi Keamanan Laut Negara, Bakorkamla, berusaha maksimal untuk dapat menjaga keamanan laut dengan melakukan berbagai operasi

bersama beberapa instansi lain sehingga tindak kejahatan berupa pencurian dan lain-lain dapat dicegah dan kerugian negara dapat diselamatkan.

TABEL 8 KEGIATAN GLADIPOSKO DAN OPERASI INTELIJEN

No	Tahun	Keterangan	Pelaksanaan	Cakupan	Hasil (mencegah Kerugian Negara)
1	2007	Operasi Gurita 1	12 - 22 April 2007	Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Perairan Dabo Singkep, Perairan Bangka Belitung, Perairan Pontianak, Selat Bangka, Selat Karimata dan Selat Galasa.	Rp 65,8 M
		Operasi Gurita 2	28 Juni - 18 Juli 2007	Perairan timur Indonesia dan Sulawesi	Rp. 60,116 M
		Operasi Gurita 3	30 Okt-18 Nov 2007	Laut Natuna, Selat Karimun, Perairan Bintan dan Batam, serta Selat Malaka	Rp. 10,65 M
2	2008	Operasi Gurita 4		Laut Arafuru	Rp. 335 M
		Operasi Gurita 5	17 Juli-5 Agt 2008	Perairan Selat Malaka, laut Natuna dan Selat Bangka	Rp. 26 M
3	2009	Operasi Gurita 4 x			
4	2010	Operasi Gurita 5 x			Rp. 150 M

Parameter 5. Pemantauan proses hukum penyelesaian perkara.

Dalam pemantauan proses hokum penyelesaian perkara, Bakorkamla hanya memiliki kewenangan dalam menjaring dan menangkap para pelanggar hukum di laut. Namun, dalam proses penyelesaian perkara, Bakorkamla menyerahkan kepada instansi lain yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian perkara tersebut. Proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di laut banyak menemui kendala karena terlalu banyaknya instansi yang menangani sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan pada instansi masing-masing.

Hal ini, menyebabkan kerugian bagi negara jika proses hukum penyelesaian perkara memakan waktu yang lama (hukumnya lambat).

SIMPULAN

Kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan sasaran dan tujuan, baik menurut renstra instansi tersebut maupun RPJMN. Setiap kinerja tidak lepas dari indikator kinerja yang dianalisis berdasarkan apa saja yang menjadi koridor tolok ukurnya, sesuai dengan peran instansi tersebut di pemerintahan. Pencapaian kinerja

berdasarkan indikator dapat di evaluasi untuk mengetahui apakah kinerja tersebut sudah tercapai secara maksimal atau masih perlu perbaikan dan pembenahan. Pencapaian dan sasaran, intinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). <http://www.bakorkamla.go.id>.

PT. Struktura, *Laporan Akhir Kajian Tolok Ukur Pencapaian Indikator Rencana Strategis Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014* tahun 2011

PT. Struktura, *Laporan Akhir Kajian Tatacara Peningkatan Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014*, tahun 2012